



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAKRUROJI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 97216

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 485.430.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/153 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 190.128.000
2. Tanah Seluas 35 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
1.680.000
3. Tanah Seluas 164 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
7.872.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 783 m2/50 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 195.750.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/36 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.500.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 579.441.747



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.182.371.747
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.182.371.747

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.